

MENJAGA WARISAN: PENDIDIKAN KARAKTER MUHAMMADIYAH TAHUN 1923-1942

Faisal Anas

Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
email: anasfaisal214@gmail.com

Naskah Masuk: 31-03-2020

Revisi akhir: 08-05-2020

Disetujuui terbit: 23-05-2020

PRESERVING INHERITAGE: MUHAMMADIYAH'S CHARACTER EDUCATION 1923-1942

Abstract

Education was the base for the founding of Muhammadiyah. Since the era of K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah schools have been designed to educate Indonesian children to become individuals who master the science of religion and general science. Muhammadiyah school graduates are expected to be able to become succeeding cadres who are not only knowledgeable, but also have a nationalist attitude. The method used in this research is literature study. Based on the results of the analysis, character education implemented by the leaders of Muhammadiyah since 1923 still sticks on the principles of education that were first applied by K.H. Ahmad Dahlan which was then adjusted to the condition at that time. This change can be seen from the educational goals formulated in the following years. Changes in educational goals are followed by curriculum publications in order to maximize educational goals that have been formulated. Muhammadiyah also responded to the policy of the Dutch East Indies colonial government which was detrimental with protests. This attitude is certainly different to the one in the era of K.H. Ahmad Dahlan which was considered to be more passive.

Keywords: *Character Education, Muhammadiyah, School.*

Abstrak

Pendidikan merupakan bidang yang melatarbelakangi pendirian Muhammadiyah. Dimulai sejak masa K.H. Ahmad Dahlan, sekolah Muhammadiyah dirancang untuk mendidik anak-anak Indonesia agar menjadi pribadi yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Para lulusan sekolah Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi kader penerus yang tidak hanya berilmu, namun juga memiliki sikap nasionalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan karakter yang diterapkan oleh pimpinan Muhammadiyah sejak tahun 1923 masih berpijak pada prinsip pendidikan yang diterapkan pada masa K.H. Ahmad Dahlan yang kemudian disesuaikan dengan kondisi saat itu. Perubahan ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang dirumuskan pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan tujuan pendidikan diikuti oleh publikasi kurikulum agar dapat memaksimalkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Muhammadiyah juga menyikapi kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang merugikan dengan protes. Sikap ini tentu berbeda ketika Muhammadiyah masih bersikap pasif pada masa K.H. Ahmad Dahlan.

Kata Kunci: *Pendidikan Karakter, Muhammadiyah, Sekolah.*

I. PENDAHULUAN

Permulaan abad ke-20 merupakan titik munculnya berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan pembaruan Islam atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tajdid*. Munculnya gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari pembukaan Terusan Suez yang memudahkan umat Islam untuk mencapai Timur Tengah.¹ Saat itu, Makkah dan Universitas Al-Azhar di Kairo merupakan sumber pembaruan Islam yang diterima oleh orang Indonesia.

Paham pembaruan dipelopori oleh Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Prinsip utama mereka adalah kembali ke Al-Qur'an dan Hadis. Gagasan ini bisa terwujud melalui pendidikan Islam modern yang dalam kurikulumnya mengandung pelajaran agama dan ilmu-ilmu yang memenuhi kebutuhan dunia modern.²

Salah seorang tokoh Islam yang terpengaruh gagasan pembaruan adalah K.H. Ahmad Dahlan, seorang *abdi dalem* Keraton Yogyakarta. Ia mendirikan sebuah sekolah bernama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah* sebagai sarana untuk mewujudkan gagasan pembaruannya pada tahun 1911. Pada tahun 1912, untuk melindungi keberadaan sekolahnya, ia membentuk sebuah organisasi bernama Muhammadiyah yang berarti sekelompok orang yang berusaha mengidentifikasi dirinya atau membangsakan dirinya sebagai pengikut, penerus, dan pelanjut dakwah Nabi Muhammad SAW. dalam mengembangkan tata kehidupan masyarakat.³

Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang telah berdiri setahun sebelum Muhammadiyah, telah berjalan dengan sistem tiga jenjang kelas. Adanya mata pelajaran ilmu umum disamping pelajaran

agama Islam telah menempatkan sekolah ini setaraf dengan *sekolah angka loro* atau *volkschool* yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sekolah di Kauman ini mendapat subsidi dari pemerintah sejak tahun 1914.⁴ Pembangunan sekolah di Kauman juga diikuti dengan pendirian beberapa sekolah baru di kawasan Residensi Yogyakarta, yaitu di Karangkalen, Yogyakarta pada 1913, di Lempuyangan tahun 1915, di Pasar Gede (Kotagede) tahun 1916, dan seterusnya.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendidikan karakter yang ada dalam sekolah Muhammadiyah selama tahun 1923 hingga tahun 1942. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah untuk menguraikan perubahan pendidikan karakter sebelum tahun 1923 dan pada tahun-tahun setelahnya.

II. PENDIDIKAN KARAKTER MUHAMMADIYAH 1923-1942

A. Karakter Lulusan Sekolah Muhammadiyah

Kemunduran politik yang diderita kaum muslim di Indonesia yang takluk dari pemerintah kolonial Belanda berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, tidak terkecuali bidang agama. Kehidupan keagamaan yang dilakukan muslim di Indonesia berkembang sikap *taklid* (mengikuti secara membabi buta tanpa mengetahui kebenarannya), kecenderungan pengajaran Islam yang mengarah ke tasawuf dan mistisisme, serta bercampurnya praktek keagamaan seperti *bidah*, *tahayul* dan *khurafat*.⁶

Kondisi yang dialami umat Islam membuat prihatin K.H. Ahmad Dahlan. Sebagai seorang yang menyadari pentingnya ilmu bagi murid-muridnya, K.H. Ahmad Dahlan memiliki pandangan untuk membentuk lulusan yang mampu menguasai ilmu

1 Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 68.

2 *Ibid.*

3 Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 4-5.

4 Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 40.

5 Muhammad Raihan Febriansyah, dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2013), hlm. 5.

6 Suwarno, *Pembaruan Pendidikan Sayyid Ahmad Khan dan K.H. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 53.

umum dan ilmu agama. Karakter lulusan yang dicita-citakan K.H. Ahmad Dahlan sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Ali dari Amir Hamzah, sebagai berikut:

1. Baik budi, alim dalam ilmu agama;
2. Luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia (ilmu umum);
3. Bersedia berjuang untuk masyarakatnya.⁷

Pada saat itu, para lulusan pesantren merasa cukup dengan ilmu agama yang dimiliki, sehingga tidak perlu mencari ilmu umum. Sebaliknya, alumni sekolah pemerintah kolonial merasa bahwa mereka sudah cukup memiliki ilmu umum.⁸ Perbedaan ini pada akhirnya memecah orang-orang Indonesia itu sendiri. Timbul prasangka buruk dan saling ejek diantara kedua belah pihak. Karena itulah K.H. Ahmad Dahlan ingin membentuk lulusan dengan poin (1) dan (2) yang mampu menyeimbangkan ilmu umum dan ilmu agama.

Selanjutnya, kedua tipe lulusan ini dibentuk untuk tujuan berbeda. Lulusan sekolah kolonial memiliki tujuan agar bisa menembus lapangan pekerjaan milik pemerintah kolonial maupun perusahaan milik orang Belanda.⁹ Bertolak belakang dengan lulusan pesantren yang pada akhirnya akan menggunakan ilmu agamanya sebagai panduan hidup. Jika ada yang menguasai ilmu agama secara baik maka akan mendirikan pesantren baru di pedalaman dan hidup terpisah dari masyarakat. Dalam poin (3) disebutkan bahwa lulusan sekolah Muhammadiyah diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat, tidak hanya menggunakan ilmunya untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut K.H. Ahmad Dahlan, orang Islam harus berani terjun langsung menangani persoalan sosial yang terjadi masyarakat sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan Muhammadiyah memiliki jangkauan yang wilayah yang

lebih luas. Timbul dalam pikiran para pemimpin Muhammadiyah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pada masa itu. Oleh karena itu, pada kongres tahun 1936, Muhammadiyah merumuskan “Dasar-dasar Perguruan Islam” yang memuat tiga hal penting yaitu:

1. Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar semangatnya dengan khusyuknya, lagi cerdas otaknya;
2. Badannya sehat, tegap bekerja;
3. Hidup tangannya, mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya itu membawa faedah yang besar dan berharga tinggi bagi badannya, dan juga masyarakat hidup bersama.¹⁰

Pada poin pertama dijabarkan bahwa Muhammadiyah ingin membentuk murid-muridnya menjadi pribadi yang memiliki semangat tinggi dan khusyuk serta memiliki kecerdasan otak. Ada tiga kata yang digarisbawahi disini, yaitu semangat tinggi, dalam hal ini bisa dimaknai bahwa Muhammadiyah ingin mendidik murid yang memiliki nasionalisme dan patriotisme. Semangat nasionalisme dianggap penting saat itu, yakni ketika banyak organisasi pergerakan yang berjuang untuk menggapai kemerdekaan yang secara langsung maupun tidak langsung juga merembes ke Muhammadiyah.

Semangat nasionalisme ini merebak dan semakin semarak memasuki tahun 1930-an. Banyak sekolah swasta yang berdiri sepanjang dekade ini yang disokong oleh para nasionalis.¹¹ Sekolah swasta, termasuk Muhammadiyah di dalamnya memang sedang mendapat angin segar dalam menunjang pertumbuhannya. Bisa dibilang, ini adalah segi positif dari banyaknya sekolah swasta yang berdiri saat itu. Akan tetapi, dari sisi lainnya, tumbuh persaingan dari sekolah-sekolah swasta tersebut. Salah satu kasus

7 Mohammad Ali, “Kiai Ahmad Dahlan: Paradigma Pendidikan Muhammadiyah”, dalam *Basis No. 07-08*, 2010, hlm. 27.

8 *Ibid.*

9 M. Yusron Asrofie, *Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), hlm. 26.

10 Mh. Djaldan Badawi, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Mukhtar* (Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2007), hlm. 90-91.

11 Abdurrahman Surdjomihardjo, “Yang Lebih Dahulu dari Tokoh Politik” dalam *Prisma No. 11*, November 1985, hlm. 64.

yang menarik adalah persaingan antara Sekolah Kristen yang memiliki lembaga pendidikan bernama *HIS Met de Bijbel*. Para pengurus bagian sekolahan Muhammadiyah kemudian menandinginya dengan mendirikan *HIS Met de Quran*.

Poin kedua dalam Dasar-Dasar Perguruan Muhammadiyah adalah badannya sehat, tegap bekerja. Jauh hari sebelum adanya poin ini, dalam kurikulum Muhammadiyah disebutkan bahwa salah satu mata pelajarannya adalah gerak badan¹², atau pelajaran olahraga. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah ingin murid-muridnya memiliki badan yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya.

Poin terakhir dimaknai bahwa murid-murid lulusan sekolah Muhammadiyah diharapkan mampu untuk mencari rezeki dari tangannya sendiri sehingga bisa memberikan kebaikan dari apa yang dihasilkannya tidak hanya kepada dirinya sendiri, namun juga berpengaruh kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan poin ini, Muhammadiyah mendirikan berbagai jenis sekolah seperti Sekolah Dagang Kecil (*Klein Handel School*), Sekolah Tenun, dan Sekolah Pertukangan di Yogyakarta. Muhammadiyah juga mendirikan Sekolah Pertanian (*Klein Landbow School*) dan Sekolah Kerumahtanggaan (*Huishoud School*) yang terletak di Solo.¹³ Pendirian sekolah-sekolah tersebut bertujuan agar lulusannya mampu memperbaiki taraf hidupnya dengan ketrampilan yang dimiliki.

B. Kurikulum Sekolah Muhammadiyah

Istilah kurikulum pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno. *Curriculum* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Currir*, yang artinya pelari dan *Curere* yang berarti tempat berpacu. *Curriculum* dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Mengambil

makna yang ada di atas, kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk memperoleh ijazah.¹⁴

Pada tahun awal kemunculan Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan memasukkan pembaruan kurikulum sebagai bagian didalamnya. Pada saat itu, kurikulum terbilang hal yang baru bagi pendidikan Islam tradisional. Tujuan K.H. Ahmad Dahlan menggunakan kurikulum sendiri adalah untuk mengatasi perbedaan yang ada di sekolah modern yang lebih menekankan penguasaan ilmu-ilmu umum dan pesantren yang hanya menekankan pembelajaran Islam.

Pada masa K.H. Ahmad Dahlan, belum ada catatan tertulis mengenai kurikulum sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri baru memiliki catatan tertulis tentang kurikulum pada tahun 1924 atau setahun setelah K.H. Ahmad Dahlan wafat. Publikasi kurikulum ini merupakan upaya untuk mengorganisir sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Dalam pelaksanaannya, dirumuskan dua model kurikulum yang menjadi acuan dalam sekolah Muhammadiyah. *Pertama*, kurikulum yang mengadaptasi kurikulum sekolah kolonial dan ditambahkan mata pelajaran agama Islam di dalamnya. Kurikulum model ini diterapkan dalam sekolah-sekolah umum Muhammadiyah seperti *volkschool*, *standaardschool*, *Holland inland school* (HIS), *meer uitgebreid lager onderwijs* (MULO), dan *Holland inlands kweekschool* (HIK).¹⁵ Sekolah-sekolah ini mengikuti kurikulum pemerintah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum ditambah dengan ilmu agama. Perbandingan kedua mata pelajaran biasanya 10 persen atau 15 persen untuk pelajaran agama dari keseluruhan kurikulum. Penyelenggaraan ilmu agama menjadi ciri bahwa sekolah tersebut milik Muhammadiyah. Salah satu hasil rumusan kurikulum yang direncanakan oleh K.H. Hisyam dan jajaran Pengurus Majelis

12 Farid Setiawan, *Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah 1911-1942* (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2015), hlm. 280.

13 Mh. Mawardi, "Perkembangan Perguruan Muhammadiyah: Dengan Benih Pengajian dan Sekolah Kyai (II)", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-58, Mei 1978, hlm. 13.

14 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1991), hlm. 4.

15 A. Jainuri, *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 72.

Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dalam model pertama adalah *leerplan* (rencana pembelajaran) pada Sekolah Klas II Muhammadiyah.¹⁶

Model kurikulum *kedua* adalah kurikulum khas Muhammadiyah.¹⁷ Dalam kurikulum model ini disusun berdasarkan kebutuhan Muhammadiyah sendiri. Salah satu contohnya adalah kebutuhan Muhammadiyah akan kurangnya kader muda yang sanggup menjadi *mubaligh/mubalighat*. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Muhammadiyah mendesain kurikulum yang lebih menonjolkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum sebagai tambahan di dalamnya. Kurikulum ini hanya diterapkan dalam sekolah khusus keagamaan. Proporsi pelajaran umum dalam kurikulum ini kurang lebih hanya 30 persen dari keseluruhan mata pelajaran yang ada. Beberapa diantaranya adalah madrasah ibtidaiah, diniyah, mubalighin, mualimin-mualimat, dan zuama.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam pembelajaran di sekolah Muhammadiyah adalah adanya pelajaran sejarah Islam yang disandingkan dengan sejarah Indonesia.¹⁸ Dalam periode awal diterangkan mengenai kejayaan dan kesempurnaan umat Islam, kemudian dibandingkan dengan kemunduran Islam. Hasil dari pembelajaran melalui sudut pandang ini untuk menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap kemerosotan dan kemunduran Islam serta untuk membangkitkan kesadaran guna mengembalikan kejayaan Islam di dunia Modern.

Selain mengajarkan pelajaran sejarah, di sekolah Muhammadiyah juga diajarkan pelajaran bahasa, terutama bahasa Jawa dan bahasa Melayu.¹⁹ Bahasa Jawa sebagai bahasa lokal diajarkan untuk menimbulkan kebanggaan terhadap budaya setempat. Farid Setiawan mengutip dari Mitsuo Nakamura menyebut bahwa cara ini merupakan salah satu jalan

untuk menanamkan nasionalisme melawan Belanda secara terselubung.²⁰ Karena di sekolah Belanda tidak diajarkan bahasa Jawa, bisa dikatakan bahwa sekolah Muhammadiyah hendak menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memahami kondisi masyarakat di sekitarnya melalui kemampuan berbahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi.

Peranan sekolah swasta tidak sama di berbagai daerah Indonesia. Di daerah yang umumnya tidak mengenal pergerakan kebangsaan atau yang aktifitasnya kurang menonjol, umumnya akan menyekolahkan anaknya ke sekolah pemerintah atau madrasah tradisional.²¹ Akan tetapi, dalam suatu wilayah yang terdapat perkembangan organisasi nasionalis, utamanya yang bernafaskan Islam, maka bersekolah di tempat tersebut merupakan pilihan yang tepat, dalam hal ini Muhammadiyah masih termasuk di dalamnya.

Poin utama yang menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan adalah murah biaya pendidikan dan sifatnya yang egaliter tanpa memperhatikan status sosial dan kekayaan. Hal yang sangat sulit ditemukan dalam sekolah milik pemerintah. Terlepas dari kualitasnya yang kadang kurang begitu baik, sekolah swasta mengajarkan arti demokratisasi dalam pendidikan dan corak baru dalam sistem pendidikan.

Bagi kaum pergerakan nasional, daya tarik sekolah Muhammadiyah terletak pada kemampuannya menjadi alternatif untuk menghadapi sekolah pemerintah yang tidak terbuka, bahkan untuk anak pedagang kaya sekalipun. Dalam kurun waktu tahun 1930-an, beberapa orang yang belajar di Timur Tengah kembali ke Jawa. Mereka memberikan sumbangan besar kepada pendidikan Muhammadiyah melalui kemampuan intelektual, organisasi maupun paham *tajdid fil Islam*.²²

16 "Leerplan Sekolah Klas II Moehammadijah", dalam *Soeara Moehammadijah*, No. 4, th. ke-5, 1924.

17 Farid Setiawan, *op. cit.*, hlm. 243.

18 Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010* (Edisi Revisi ditambah Bagian Dua) (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 111.

19 Mutiah Amini, "Meneguhkan Budaya Literasi Melalui Organisasi: Pendidikan Muhammadiyah pada Akhir Masa Kolonial, dalam Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Meneguhkan Identitas Budaya: Sejarah Pendidikan di Yogyakarta* (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017), hlm. 68.

20 Farid Setiawan, *op. cit.*, hlm. 260.

21 Mawarti Djoneod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 141.

22 M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 87.

C. PERLAWANAN MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL

Pertumbuhan sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tahun awal berdirinya hingga memasuki tahun 1942 selalu menunjukkan grafik yang positif. Meningkatnya jumlah sekolah ini merupakan hasil kerja keras para pemimpin Muhammadiyah yang diikuti oleh para anggotanya. Tentu ini merupakan hal yang menggembirakan mengingat Muhammadiyah awalnya hanya terbatas di Yogyakarta namun akhirnya mampu mendirikan berbagai sekolah di Indonesia

Pemerintah kolonial Belanda yang melihat aktivitas pergerakan nasional, termasuk Muhammadiyah di dalamnya merasakan ketakutan tersendiri. Mereka khawatir dengan aktivitas yang begitu pesat yang dilakukan oleh berbagai organisasi nasional akan mengadakan perlawanan di kemudian hari. Untuk menghambat laju pergerakan ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Ordonansi Guru 1905 dan 1925, serta Ordonansi Sekolah Liar 1932.

1. Ordonansi Guru 1905 dan 1925

Kebijaksanaan pemerintah kolonial yang dirasakan sebagai usaha menekan pendidikan umat Islam adalah Ordonansi Guru yang dikeluarkan tahun 1905. Ordonansi ini mewajibkan untuk setiap guru agama Islam agar meminta dan memperoleh izin kepada bupati sebelum mengajar. Adapaun wilayah ordonansi ini mencakup seluruh Jawa dan Madura kecuali wilayah *vorstenlanden* (Yogyakarta dan Surakarta).

Bagi umat Islam yang saat itu belum memiliki kemampuan administrasi pendidikan yang teratur, hal ini tentu menjadi kesulitan tersendiri.²³ Ditambah saat itu kebanyakan guru agama tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Tidak

begitu banyak protes dari kalangan umat Islam saat itu, mengingat mereka kurang memahami kebijakan Ordonansi Guru 1905.

Dalam pandangan pemerintah kolonial, ordonansi ini dirasa kurang efektif, karena laporan yang disampaikan bupati ternyata kurang begitu meyakinkan. Karena itu, pada tahun 1925, dikeluarkan ordonansi guru yang baru. Berbeda dengan ordonansi sebelumnya, dalam ordonansi ini setiap guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu, bukan meminta izin kepada bupati.²⁴ Ordonansi ini berlaku tidak hanya di Jawa dan Madura, tetapi juga di Aceh, Sumatera Timur, Palembang, Tapanuli, Manado dan Lombok sejak 1 Januari 1927. Bengkulu juga terkena ordonansi ini sejak tahun 1930-an.

Pada mulanya, Muhammadiyah menanggapi Ordonansi Guru 1905 hanya dengan mengirimkan mosi atau nota protes pada tahun 1923. Lantas, ketika Ordonansi 1925 dicabut dan digantikan dengan Ordonansi Guru 1925 yang secara garis besar tidak jauh berbeda isinya, Muhammadiyah melakukan protes secara keras. Pada tahun 1926, H. Fachroddin melalui Majalah *Bintang Islam* mengingatkan kepada umat Islam agar melawan keberadaan Ordonansi Guru 1925.²⁵ Perlawanan ini ternyata mampu memantik umat Islam, salah satunya adalah Kongres Al-Islam di Bogor tahun 1926 yang menyatakan menolak penerapan Ordonansi Guru 1925.

Perlawanan Muhammadiyah terus berlanjut menghadapi Ordonansi Guru. Pada Kongres Muhammadiyah tahun 1928, Muhammad Junus Anies memprotes dengan keras agar Ordonansi Guru 1925 dicabut.²⁶ Pernyataan Junus Anies ini dipublikasikan oleh surat kabar yang juga meliput Kongres Muhammadiyah 1928, salah satunya adalah *de Locomotief*.

23 Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 275.

24 Alfian, *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During The Dutch Colonial Period (1912-1942)*, Michigan: University of Wisconsin, 1969), hlm. 283.

25 Farid Setiawan, *op.cit.*, hlm. 230.

26 Tugus Tri Wahyono, "Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda tentang Pengajaran Agama Islam", dalam *Patrawidya Vol. 14, No. 1*, Maret 2013, hlm. 192.

2. Ordonansi Sekolah Liar

Sekolah swasta yang tumbuh menjamur di Indonesia pada gilirannya memunculkan kekhawatiran tersendiri terhadap pemerintah kolonial. Mereka takut dengan hadirnya sekolah swasta atau yang juga kerap disebut dengan sekolah partikelir akan mengancam keberadaan pemerintah kolonial itu sendiri. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Ordonansi Sekolah Liar guna mencegah pertumbuhan sekolah swasta. Peacock menyebut bahwa ordonansi ini menjadi penyempit gerakan Muhammadiyah pada periode 1930-an.²⁷

Seperti yang ditulis Deliar Noer, ordonansi ini secara langsung ditujukan untuk menghambat perkembangan pendidikan secara umum dan perkembangan pendidikan yang dikelola nasionalis pada khususnya.²⁸ Pasal-pasal yang harus dipenuhi terlihat sengaja diarahkan untuk menjegal lembaga nasionalis. Karena itu tidak mengherankan jika kaum nasionalis berpendapat bahwa ordonansi ini bermaksud menghentikan perkembangan kebangsaan.

Organisasi pergerakan yang sifatnya nasional maupun keagamaan menentang keras keberadaan ordonansi ini. Pada awalnya, Muhammadiyah masih ragu-ragu untuk menentang ordonansi ini mengingat sebagian sekolah Muhammadiyah menerima subsidi pendidikan dari pemerintah.²⁹ Namun, setelah pengurus besar Muhammadiyah mencermati isi ordonansi ini lebih dalam ternyata ordonansi tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan kepada semua orang yang berilmu, sekecil apapun ilmu yang dimilikinya agar mengajarkannya kepada siapa saja.³⁰

Aqib Suminto menyebutkan bahwa organisasi yang memprotes gerakan ini antara lain PSII, Permi, bersama dengan Taman Siswa, Budi Utomo, PNI, Partindo, dan Isteri Sedar.³¹ Bersama organisasi-

organisasi ini, Muhammadiyah bahu membahu memprotes agar Ordonansi Sekolah Liar dicabut. Pemerintah kolonial yang sudah tidak sanggup menghadapi protes akhirnya mencabut Ordonansi sekolah Liar 1932.

Pada tahun 1934 ketika pelaksanaan Kongres Muhammadiyah terdapat keputusan penting yakni mengubah nama-nama sekolah Muhammadiyah.³² Keputusan ini tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar 1932 yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu dalam lingkungan Muhammadiyah sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1923. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 banyak juga memperkuat perubahan nama sekolah dan lembaga Muhammadiyah. Semula beberapa lembaga dan sekolah menggunakan bahasa Belanda, namun kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia dan Arab. Bahasa Indonesia juga dipilih karena bisa mempersatukan anggota-anggota Muhammadiyah di penjuru tanah air.³³

III. PENUTUP

Pendidikan karakter yang diterapkan dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah pasca kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan merupakan lanjutan dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah menerapkan pemikiran K.H. Ahmad Dahlan pada masa awal pembentukan Muhammadiyah yang kemudian disesuaikan dengan kondisi tahun 1923 hingga tahun 1942. Bentuk penyesuaian ini bisa dilihat dari perubahan tujuan mendidik lulusan sekolah Muhammadiyah. Penyesuaian ini juga diikuti dengan penataan kurikulum.

27 James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 71.

28 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 200.

29 *Ibid.*

30 M. Daris Tamim, "Catatan Sejarah: Muhammadiyah dan Ordonansi Sekolah Liar", dalam *Suara Muhammadiyah No. 15, Th. 65*, 1985, hlm. 7.

31 H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 63.

32 Abdul Munir Mulkhan, *op. cit.*, hlm. 38.

33 Ahmad Sarwono dan Shoffrotun, K.H. R. Ng. *Ahmad Dahlan: Pembaharu, Pemersatu, dan Pemelihara Tradisi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Nurani (MATAN), 2013), hlm. 163.

Pada masa K.H. Ahmad Dahlan, cakupan pendidikan Muhammadiyah masih berada di Yogyakarta karena terbentur aturan dari pemerintah kolonial. Setelah masa K.H. Ahmad Dahlan, sekolah Muhammadiyah tumbuh pesat di berbagai wilayah Indonesia. Pertumbuhan sekolah ini tidak begitu saja berjalan dengan lancar, ada halangan yang berupa peraturan pemerintah seperti Ordonansi Guru 1905 dan 1925 serta Ordonansi Sekolah Liar 1932. Pada

masa K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tidak memprotes kebijakan pemerintah kolonial, mengingat saat itu kebijakan pemerintah, terutama ordonansi guru belum mengganggu keberadaan sekolah Muhammadiyah. Sepeninggal K.H. Ahmad Dahlan, para pemimpin Muhammadiyah aktif memprotes kebijakan pemerintah kolonial yang menghambat pertumbuhan Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1969). *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During The Dutch Colonial Period (1912-1942)*. Michigan: University of Wisconsin.
- Ali, M. (2010). Kiai Ahmad Dahlan: Paradigma Pendidikan Muhammadiyah. *Basis*, No. 07-08.
- Arifin, M.T. (2016). *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Asrofie, M. Y. (2005). *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah.
- Badawi, Mh. D. (2007). *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar*. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Benda, H. J. (1985). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Febriansyah, M. R., dkk. (2013). *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah.
- Jainuri, A. (1991). *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh*. Surabaya: Bina Ilmu.
- “Leerplan Sekolah Klas II Moehammadijah”. (1924). *Soeara Moehammadijah*, No. 4, th. ke-5.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah. (2010). *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mawardi, Mh. (1978). Perkembangan Perguruan Muhammadiyah: Dengan Benih Pengajian dan Sekolah Kyai (II). *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-58.
- Mulkhan, A. M. (1990). *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nakamura, M. (2017). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010*. Edisi Revisi ditambah Bagian Dua. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nurhajarini, D. R., dkk. (2017). *Meneguhkan Identitas Budaya: Sejarah Pendidikan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Peacock, J. L. (2016). *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Poesponegoro, M. D., Notosusanto N. (1983). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sarwono, A. S. (2013). *K.H. R. Ng. Ahmad Dahlan: Pembaharu, Pemersatu, dan Pemelihara Tradisi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Nurani).
- Setiawan, F. (2015). *Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah 1911-1942*. Yogyakarta: Semesta Ilmu.
- Shihab, A. (2016). *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Sudjana, N. (1991). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Surdjomihardjo, Abdurrahman. (1985). Yang Lebih Dahulu dari Tokoh Politik. *Prisma* No. 11.
- Suwarno. (2011). *Pembaruan Pendidikan Sayyid Ahmad Khan dan K.H. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tamim, M. D. (1985). Catatan Sejarah: Muhammadiyah dan Ordonansi Sekolah Liar. *Suara Muhammadiyah*, No. 15, Th. 65.
- Wahyono, T. T. (2013) Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda tentang Pengajaran Agama Islam. *Patrawidya* Vol. 14, No. 1, Maret.

